

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas Surabaya.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cet.1. Bandung: Mandar Maju. Bandung.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepala Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta . Jakarta.
- Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 1984. *Pidana Dan Pemidanaan. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Romli Atmasasmita. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Cet Ke-3. Bandung: Rafika Aditama. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. Bandung.

B. Jurnal

- Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia." *Mimbar Keadilan* I, no. Pidana Pemilu (2014): 13–28.
- Andriani, Astri Dwi. "Demokrasi Damai Di Era Digital." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 38–47. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>.
- Elektronik, Transaksi, and U U Ite. "DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM" 03,

- no. 01 (2023): 59–71. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1>.
- Fahmi, Khairul. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Fakhrurrozi, Muhammad. “Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Universitas Islam Indonesia*, 2020, 1–106. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/31299>.
- Hakim, Dalam Putusan. “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 5–16.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.
- Ismaya, Linda, and Rizca Sugiyantica. “Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Sebagai Sebuah Kejahatan Mayantara Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun.” *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 3 (2014): 238–45.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kartiko, Galuh. “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1–171.
- Kusumo, Vonny Kristanti, Ie Lien, Risey Junia, and Yuwono Prianto. “Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Dampak Positif Medsos : 1 . Lebih Cepat Untuk Mendapatkan Berita Yang up to Date , Baik Dari Dalam Atau Luar Negeri . 1 . Individual Dan Egoisme (Sudah Cukup Berinteraksi Di Medsos , Maka Tid,” 2021, 1069–78.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- M. Nur, Sadath, Deni Syaputra, and Fauzia Zainin. “Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media.” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 509–26. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.355>.
- Nasir, Iqbal. “Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan.” *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 41–50. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>.
- Nasution, Miranda Lufti, and Nabil Abduh Aqil. “UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol Dan Ancaman Kebebasan Berinternet.” *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022): 35–47. <https://doi.org/10.32734/rsr.v1i1.9253>.
- Nuryadi, Deni. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesua.” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016).
- Parulian, Sahat, Devi Anassalifa Pratiwi, and Meiliya Cahya Yustina. “Ancaman Dan Solusi Serangan Siber Di Indonesia.” *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)* 1, no. 2 (2021): 85–92. <http://ejournal.upi.edu/index.php/TELNECT/>.

- Permatasari, Indah. "Pengaturan Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyyah." Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023.
- Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Teorisme." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 16–31.
- Pratama, Ramon Azmi, and Dheny Wahyudi. "Problematisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 152–75. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>.
- Putri Natasya, Dwi, and Dian Andriasari. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4922>.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.
- S, Laurensius Arliman. "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 225–40. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Samuel, Chrito Junior Kilapong. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Lex Crimen IX*, no. No. 3 (2020): 218–28.
- Silaen, Febriyanti, and Amry Syawal Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. April 2020 (2020): 8–16.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221. <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>.
- Sulchan, Achmad. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2014): 350–59.
- Tahun, Nomor, Tentang Pemilihan, and Nina Yulawati. "Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH GAKUMDU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG." *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021): 71–89.
- Warjiyati, Sri. *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM Konsep Dasar Ilmu Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.
- Yani, Ahmad. "URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 URGENCE OF REGULATION OF CRIMINAL ACTIONS IN ELECTRONIC ELECTION IMPLEMENTATION IN 2024 PENDAHULUAN Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam ,," no. 19 (2024):

161–82.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana